

SEJARAH DIBENTUKNYA FATO GHOERANO DIKERAJAAN MUNA 1600-1920¹

OLEH:

Joni²

email: joni1987@gmail.com

Dade Prat Untarti³

email: dade.pratuntarti@uho.ac.id

ABSTRAK: Permasalahan dalam penelitian ini membahas mengenai latar belakang dibentuknya *fato ghoerano* di Kerajaan Muna 1600-1920, proses dibentuknya *fato ghoerano* di Kerajaan Muna 1600-1920 dan dampaknya terhadap kerajaan Muna 1600-1920. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah menurut Helius Samsudin dimana tata kerja metode ini adalah (1) Heuristik (teknik pengumpulan data) (2) Kritik Sumber (analisis data) (3) Interpretasi (penafsiran) (4) Historiografi (penyusunan penulisan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibentuknya *fato ghoerno* karna penambahan jumlah penduduk menyebabkan perluasan area pemukiman dan perluasan wilayah kerajaan. Luasnya wilayah kerajaan jelas menyulitkan bagi seorang raja dalam menjalankan pemerintahan serta dalam mengontrol seluruh wilayah kerajaan. Demikian pula halnya yang dialami raja La Titakono di kerajaan Muna pada tahun 1920 dimana terjadi pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga kerajaan Muna pada saat itu bertambah luas. Untuk mengatasi hal itu maka raja La Titakono membagi wilayah kerajaan Muna menjadi *fato ghoera* (empat wilayah). Proses dibentuknya *fato ghoerano* di kerajaan muna 1600-1920 untuk memperlancar jalannya pemerintahan di daerah, olehnya La Titakono membagi wilayah kerajaan Muna menjadi empat 4 wilayah (*fato ghoerano*) dan tiap-tiap *ghoera* (kepala daerah) mempunyai hak untuk mengatur sendiri daaerahnya. Pembentukan pemerintahan *Ghoera* memberikan dampak yang positif dalam mengatur sistem pemerintahan, daerah-daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sehingga sangat membantu tugas dari raja Muna dalam menjalankan pemerintahan.

Kata Kunci: Latar Belakang, Proses, Dampak, Fato Ghoerano

PENDAHULUAN

Muna adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara yang diresmikan sebagai Kabupaten pada tahun 1960. Nama Muna adalah nama daerah yang dulu bernama Wuna. Konon penamaan Wuna didasarkan adanya sebuah bukit karang yang ada di Muna dimana dalam waktu tertentu karang tersebut tumbuh dan menyerupai bunga batu yang disebut kontu kowuna (batu berbunga), sehingga inilah yang menjadi dasar penamaan Wuna.

Sejarah pulau Muna sudah di mulai sejak zaman praaksara, yang ditandai dengan ditemukannya jejak-jejak atau lukisan-lukisan purba yang terdapat di Gua-gua seperti Liang Kobori dan Metanduno. Di pulau Muna hingga saat ini berkembang mitos tentang Sawergading. Konon dahulu kala pulau Muna digenangi dengan air, pada suatu hari berlayarlah di laut ini sebuah perahu, di dalamnya berada seorang lelaki yang bernama Sawirgadi (Sawergadi). Perahu tersebut terbentur pada batu karang di bawa permukaan air laut terdampar. Nama Sawergading adalah putra dari lakina Luwu, yang dilahirkan ibunya dengan seekor ayam kuning sehingga dianggap sebagai

¹ Hasil Penelitian

² Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah

³ Dosen FKIP UHO

orang mulia. Setelah terdampar perahunya, berjalanlah Sawirigadi di atas daratan yang baru muncul itu sampai pada Wisenokontu (di sekitar Kampung Tanjung Batu sekarang), dan dari sana kembali ke tanah asalnya di seberang (wiaseno kontu berarti 'depan batu itu'). Setelah itu Lakina Wulu mengutus beberapa orang untuk mencari perahu Gawirigadi. Sebagian dari orang-orang ini konon menetap di pulau Muna, dan merupakan penghuni pertama pulau Muna kemudian mereka mendirikan suatu koloni yang mereka namakan Wamelai (artinya nama ini tidak diketahui). Kampung ini sampai saat ini masih ada akan tetapi dari kampung Tongkuno (J.Couvreur, 2001: 22).

Masyarakat Muna yang mendiami pulau Muna pada masa lampau pernah menjadi sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja secara turun temurun dengan sistem pemerintahan *Ghoera*. Sistem pemerintahan *Ghoera* di kerajaan Muna diterapkan pada masa pemerintahan La Titakono. Sistem *Ghoera* adalah suatu sistem pemerintahan dimana daerah-daerah diberikan hak otonom untuk menjalankan pemerintahan sendiri di daerahnya (J.Couvreur, 2001: 35)

Keberadaan *ghoera* dalam kerajaan muna sangat membantu pemerintahan di kerajaan Muna, dengan adanya model pemerintahan tersebut raja tidak lagi turun tangan mengatasi berbagai permasalahan secara langsung, apalagi wilayah pemerintahan semakin luas dan juga bertambahnya jumlah penduduk menjadikan system pemerintahan *ghoera* sangat dibutuhkan saat itu, walaupun pada akhirnya istilah ini berubah menjadi distrik setelah masuknya Belanda (VOC) di Pulau Muna.

KAJIAN PUSTAKA

Sejarah sebagai ilmu yang berhubungan dengan prosedur pengupulan sumber dan penarikan fakta dari sumber sejarah yang dilakukan oleh sejarawan atau dengan kata lain bahwa sejarah sebagai ilmu yang menyangkut teknik-teknik dalam menyusun dan merekonstruksi sejarah sebagai peristiwa berdasarkan fakta-fakta sejarah yang dimilikinya. Sebagai suatu disiplin ilmu, ilmu sejarah setara dengan ilmu-ilmu lain karena dengan penyusunannya telah menggunakan metode analisis yang kritis, walaupun ada proses-proses tertentu yang berbeda dengan proses ilmiah menurut cerita ilmu pengetahuan lainnya. Karena sebagaimana ilmu-ilmu lain, sejarah sebagai suatu ilmu pengetahuan juga mempunyai pengertian dan kajian tersendiri.

Karena pentingnya sejarah sebagai bagian dari kehidupan manusia sehingga melahirkan ahli-ahli sejarah dan konsep serta teori yang berbeda-beda. Para ahli sejarahpun memberikan definisi sejarah yang berbeda-beda, seperti yang dikemukakan oleh Hugiono (1987: 19), "Sejarah adalah gambaran tentang masa lampau yang dialami oleh manusia. Disusun dengan melalui cara ilmiah meliputi renten waktu, diberi tafsiran dan analisa, kritik, sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Dengan mempelajari sejarah, maka tidak luput dari persoalan manusia dan lahirnya sebagai peristiwa".

Latar belakang terbentuknya kerajaan, para ahli berpendapat sesuai dengan sudut pandang masing-masing salah seorang ahli filsuf Yunani kuno yang bernama Aritoteles mengemukakan bahwa: manusia itu adalah zoon politikon atau selalu hidup bermasyarakat. Jika masyarakat itu teratur karena cita-cita yang sama, pertalian darah sama, karena satu kepercayaan dan keyakinan sehingga menimbulkan perasaan senasib sehingga seperuntungan dan seperjuangan dinamakan *natie* dalam bahasa Indonesia sama dengan bangsa, (Samidjo, 1986: 27).

Berhubungan dengan pendapat diatas, maka Ibnu Khaldun beranggapan bahwa "sejarah adalah kisah masyarakat atau kisah kebudayaan yang merupakan perubahan manusia secara umum sebagai usaha penyempurnaan hidupnya, (Hugiono, 1987: 81). Dalam mempelajari dan memahami suatu yang berhubungan dengan semua aktivitas manusia pada masa lampau, tidak bisa melepaskan

diri dari sejarah. Sejarah mengajarkan tentang masa lampau dan dari itu bercermin dan menilai perbuatan mana yang merupakan kegiatan manusia. Sejarah mempunyai pengertian luas dan beragam. Disuatu pihak sejarah dapat dilihat sebagai rangka peristiwa, kejadian pada kelompok manusia pada masa lampau, dalam hal ini sejarah menyimpan seluruh pengalaman suatu kelompok umat manusia pada masa lampau. Dalam hal ini sejarah menyimpan seluruh pengalaman suatu kelompok umat manusia yang besar bahkan seperti bangsa. Sejarah mengandung khasanah yang penuh dengan peringatan, pelajaran dan petunjuk bagi perkembangan hidup. Disinilah sejarah merupakan akumulasi kejadian dimasa lampau, sedangkan dilain pihak sejarah merupakan kisah, cerita kejadian yang ditulis oleh para sejarawan dan pencatat untuk berbagai tujuan.

Kerajaan merupakan produk manusia dalam memenuhi hasratnya untuk keamanan dan ketentraman hidup dengan membentuk suatu kelompok atau persekutuan yang lama kelamaan menjadi besar dan lahirnya menjadi kerajaan. Sebagaimana di ketahui bahwa sebagai kelompok manusia tentu di dalamnya terdapat aturan-aturan yang dapat mengatur segala tindakan anggota harus tunduk pada kekuasaan tertinggi kekuasaan tertinggi ada pada kerajaan, hal ini sesuai dengan pendapat R.M Mac Iver bahwa, " kerajaan merupakan persekutuan manusia memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi" (Waming, 1983: 4).

Kenyataan dalam sejarah bangsa-bangsa bahwa kerajaan mengalami perkembangan pasat surut yakni, tumbuh, berkembang, jaya dan runtuh sebagai ketidak mampuan pemimpin atau penguasa dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai apa yang di kemukakan Hutaeruk (1983: 14) bahwa: Kelompok-kelompok (*society*) dan peradaban akan bertahan dan maju karena usaha kelompok kecil yang berdaya cipta (kreatif) akan mundur dan tenggelam kalau kepemimpinan tidak kreatif dalam mengatasi tantangan zaman yang dihadapi.

Suatu kerajaan tumbuh dan berkembang tergantung dari pada dari kemampuan pemimpin kerajaan. Karena dalam menegakan kerajaan perlu adanya keterpaduan segala unsur dalam menjalankan peranan masing-masing. Dengan demikian kerajaan dapat terbentuk dan tergantung dari usaha manusia sebagai penghuni tersebut.

METODE PENELITIAN

Tempat atau lokasi penelitian adalah Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Kabawo, Kecamatan Katobu, Kecamatan Lawa untuk yang saya sebut terakhir secara adminitrasi telah menjadi wilayah Kabupaten Muna Barat. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian sejarah yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan strukturis. Pendekatan sturkturis yaitu mempelajari peristiwa dan struktur sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Artinya peristiwa mengandung kekuatan mengubah struktur sosial, sedangkan struktur mengandung hambatan dan dorongan bagi tindakan perubahan dalam masyarakat, (Leirissa 1962: 12).

Sumber data penelitian terdiri atas (1) Sumber lisan, yaitu data yang diperoleh melalui studi lisan (hasil wawancara) dengan beberapa informan yang merupakan tokoh masyarakat setempat yang dianggap banyak mengetahui tentang penelitian ini. (2) Sumber tertulis, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk buku, arsip, skripsi serta laporan hasil penelitian yang relevan dan sumber-sumber tertulis lainnya. (3) Sumber visual, yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengamatan atau observasi terhadap Sejarah dibentuknya Fato Ghoerano di Kerajaan Muna.

Penelitian ini penulisan menggunakan metode penelitian sejarah yang dikemukakan oleh Helius Sjamsuddin (2007: 17-239) yaitu: (1) Heuristik (pengumpulan sumber), Penelitian kepustakaan, Penelitian lapangan (pengamatan, wawancara, studi dokumen) (2) Kritik sumber

(verifikasi data) terdiri atas kritik eksternal dan kritik internal, Historiografi (penulisan) terdiri atas penafsiran, penjelasan, dan penyajian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Dibentuknya Fato Ghoerano Di Kerajaan Muna.

Kenyataan dalam sejarah bahwa suatu peristiwa atau kejadian yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia tidak ada yang berdiri sendiri. Peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya merupakan suatu mata rantai yang saling berhubungan. Peristiwa hari ini merupakan kelanjutan dari peristiwa kemarin dan akan berlanjut pada hari esok. Demikian pula jika kita berbicara tentang dibentuknya Fato Ghoera di kerajaan Muna tentu kita perlu melihat bagaimana latar belakangnya sehingga dapat terbentuk.

Pada tahun 1600 Muhammad Idrus (La Titakono) di angkat menjadi raja di Muna menggantikan La Posasu. Dalam masa pemerintahannya ia banyak mengadakan pembaharuan dalam pemerintahan kerajaan Muna. Salah satu diantaranya adalah membentuk Fato Ghoera di kerajaan Muna. (Tamburaka, 2004:382).

Pada umumnya kondisi suatu wilayah atau keadaan penduduk turut mempengaruhi pola kepemimpinan dalam suatu Negara atau kerajaan. Demikian pula hal ini turut menimpa situasi di kerajaan Muna dimasa kepemimpinan Raja La Titakono yang berbeda dengan pola kepemimpinan raja-raja sebelumnya. Pemerintahan raja-raja sebelumnya masih bersifat sentralisasi. Hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduk pada saat itu masih sedikit sehingga mudah dikontrol. Bahkan seorang informan mengatakan bahwa “dulu hanya ada satu *katuko bulawa* (tongkat emas) yang ada di kerajaan Muna. Pengertian katukobulawa adalah tongkat kepemimpinan kerajaan. Tetapi setelah Raja La Titakono dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, sehingga mempersulit bagi raja dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu cara untuk mengatasi segala kendala yang ada dalam pemerintahan kerajaan Muna, maka Raja membentuk Fato Ghoera, Raja La Titakono membagi Kerajaan Muna menjadi 4 wilayah dan tiap Ghoera mempunyai kampung bawahan yakni: *Ghoera Tongkuno* (wilayah tongkuno), *Ghoera Lawa* (wilayah lawa), *Ghoera Kabawo* (wilayah kabawo), *Ghoera Katobu* (wilayah katobu).

Dengan dibentuknya Ghoera dalam pemerintahan kerajaan Muna, memberi wewenang secara otonomi tetapi masih dibawah naungan raja, dan yang memimpin *Ghoera* hanya dari golongan Sara (pemanggu adat) yang diberi nama *Koghoerano* (kepala) secara turun temurun. Dan yang mendapat gelar pertama Koghoerano La Malindu memimpin *Ghoera Tongkuno*, Wa Daga memimpin *Ghoera Lawa*, Wa Opu memimpin *Ghoera Kabawo*, La Ilangga memimpin *Ghoera Katobu*. Dari mereka itulah yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin *Ghoera*.

Setelah dibentuk *Fato Ghoera* sangat memudahkan raja dalam menjalankan pemerintahannya, dimana sebelum dibentuknya Ghoera Muna memiliki tiga model pemerintahan: masa *Kamokula*, para Sugi dan raja namun demikian sifat pemerintahan kampung. Sebelum Dibentuknya *Fato Ghoera* kerajaan Muna terlebih dahulu dibentuk *Fatolindono* (empat kampung) yang sistem pemerintahannya bersifat kampung yang dikepalai oleh beberapa *Mieno* (kepala kampung) yakni: Kansitala dengan *Mieno La Kadea Honta*, Kaura dengan *Mieno La Mpihihi*, Limbo dengan *Mieno La Rita*, Ndoke dengan *Mieno La Ndomu*. (J.Couvreur, 2001 :60-62)

Nama-nama kampung tersebut diambil dari situasi musyawarah yang dilakukan oleh raja La Titakono untuk membicarakan tentang pembagian wilayah kerajaan Muna dalam rangka mempermudah pelaksanaan pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan situasi musyawarah tersebut adalah: Kansitala asal kata Tala (jejer atau baris) yang berarti situasi musyawarah dimana

para anggota yang hadir duduk berjejer, *Limbo* (berkumpul) yang berarti anggota musyawarah sedang berkumpul dalam membicarakan sesuatu, *Kaura* (ribut) yang berarti mereka dalam musyawarah sedang ribut membicarakan sesuatu. *Ndoke* (kera) berarti perkumpulan mereka itu laksana perkumpulan kera (wawancara dengan Ismail 2 februari 2018)

Dari ke empat kampung tersebut lama-kelamaan bertambah luas akibat bertambahnya jumlah penduduk. Keadaan ini turut mempengaruhi pola kepemimpinan La Titakono dan mendorongnya untuk lebih mempercepat pembangunan kerajaan pada saat itu. Keadaan wilayah yang begitu luas serta jumlah penduduk yang semakin banyak maka tidak jalan lain harus mengangkat pembantu dalam menjalankan pemerintahan.

Tindakan pertama yang dilakukan oleh raja La Titakono dan Mintarano Bitara. Sebagai mana dikatakan bahwa suatu hari raja (La Titakono) mengadakan pertemuan besar yang dihadiri oleh seluruh dewan pemerintahan kerajaan Muna untuk membicarakan perubahan yang dimaksud. Ditetapkan dalam musyawarah tersebut untuk mengangkat jabatan baru yaitu Bonto Balano (Mentri Besar) dan Mintarani Bitara (Pengacara). (Wawancara dengan La Mahi, 30 maret 2018).

Selain pertambahan jumlah penduduk dan perluasan wilayah, maka keadaan perkembangan zaman juga turut mempengaruhi pola kepemimpinan La Titakono. Hal ini dapat dilihat adanya perubahan yang terjadi di Sulawesi Tenggara dalam zaman itu abad ke 16 dalam bidang pemerintahan seperti yang terjadi di Buton, Muna, Konawe, Mekongga dan lain-lain. Berdasarkan beberapa perubahan sistem pemerintahan di beberapa kerajaan di Sulawesi Tenggara tersebut maka akan memberi gambaran kepada kita tentang kondisi Sulawesi Tenggara sehingga memungkinkan bagi kerajaan Muna untuk mengadakan perbaikan pemerintahan dengan menerapkan pemerintah *Ghoera* (wilayah).

Disamping itu kerajaan Muna yang terletak dijalur pelayaran dan perdagangan nusantara sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh dari luar. Karena pada saat itu di Muna banyak disinggahi oleh para pedagang sebagaimana dikatakan bahwa: dalam sejarah pelayaran dunia, Muna terletak dalam garis pelayaran kecil yaitu dari malaka ke Indonesia bagian timur perahu-perahu yang berlayar dari ujung Bira atau pulau selayar menuju ke Timur akan mendarat terlebih dahulu ketempat pelabuhan terdekat yaitu di Gu teluk La Songko pelabuhan berikutnya perahu itu dapat singgah dengan maksud yang sama ialah Lohia yang letaknya juga di Muna pantai sebelah timur.

Proses Dibentuknya Fato Ghoerano Di Kerajaan Muna.

Pada tahun 1600 Muhammad Idrus menjadi Raja Muna dengan gelar (La Titakono). Pada masa pemerintahannya di kerajaan muna banyak mengalami perubahan baik luas wilayah maupun sistem pemerintahan. Mengenai luas wilayah kerajaan ia membuka bebrapa perkampungan baru sehingga luas wilayah kerajaan Muna bertambah. Sedangkan dalam sistem pemerintahan raja La Titakono menerapkan sistem pemerintahan *Ghoera* dimana daerah-daerah mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri di daerahnya. Sistem pemerintahan *Ghoera* ini merupakan perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan sentralisasi kesistem pemerintahan Desentralisasi. Oleh karena itu peranan Mieno *Ghoera* atau kepala daerah sangat penting dalam mengkoordinasikan pemerintahan yang ada di daerah (Tamburaka, 2004: 382-385)

Dalam rangka memperlancar jalannya pemerintahan di daerah, maka La Titakono membagi wilayah kerajaan Muna menjadi empat 4 wilayah (*Fato Ghoera*) dan tiap-tiap *Ghoera* dikepalai *Mieno Ghoera* (kepala daerah). Jadi tiap tiap *Ghoera* mempunyai hak untuk mengatur sendiri daerahnya. Disamping itu sebelum dibentuknya *Fato Ghoera* tersebut terlebih dahulu raja

mengangkat *Bhonto Balano* La Marati dan *Mintarano Bitara* La Baludu. Mereka ini kelak membentuk dewan kerajaan Muna yang lebih dikenal dengan nama sarano wuna. Dewan inilah yang bertugas membagi kerajaan Muna menjadi *Fato Ghoerano* (4 wilayah).

Pembagian *Fato Ghoera* (4 wilayah) tersebut didasarkan pada ke empat anak *Bonto Balano* La Marati (Bata laiworu) yaitu: La Malindu sebagai *Mieno Ghoera* Tongkuno, Wa Daga sebagai *Mieno Ghoera* Lawa, Wa Opu sebagai *Mieno Ghoera* Kabawo, La Ilangga sebagai *Mieno Katobu*. Nama-nama Tongkuno, Lawa, Kabawo dan Katobu, menurut pengakuan dari seorang informan bahwa “nama tersebut didasarkan atas hak dalam menentukan keputusan dari putra-putri *Bonto Balano* La Marati yaitu: Tongkuno asal kata (*Tongku*) yang berarti memikul tanggung jawab penuh terhadap suatu keputusan. Karena ia sebagai kaka (La Malindu) bahkan *Mieno* Tongkuno dapat dianggap sebagai orang kedua dari *Bonto Balano*, Lawa asal kata melewati (mempertemukan) yang berarti mempertemukan pendapat diantara *Mieno* dalam musyawarah. Bahkan ada juga mengatakan bahwa *Lawa* berarti tangga. Sebab ia (Wa Daga) sebagai anak kedua sebagai perantara, Kabawo asal kata *Mebawoni* (menambah atau menyempurnakan) berarti ia sebagai anak ke tiga (Wa Opu) dapat mengusulkan setiap keputusan yang belum tuntas, Katobu asal kata *Metobuno* (kelompokan/klasifikasikan) setiap hasil musyawara. Karena ia (La Ilangga) sebagai anak *Kampufu* (bungsu) sehingga hanya mengikut saja. Pada kelompok mana ia berada. Bahkan ada juga pendapat bahwa Katobu tidak boleh mengeluarkan suatu keputusan sendiri (wawancara dengan Ismail 2 februari 2018)

Di samping jabatan tersebut dibentuk pula dewan kerajaan pada saat itu atau *Sarano Wuna* (syarat Muna) yang bertugas mengawasi Raja dalam menjalankan pemerintahan kerajaan muna dan mereka juga sebagai pemerintah pusat. Mereka inilah yang mengawasi Raja dalam menjalankan pemerintahan kerajaan muna dan mereka juga sebagai pemerintah pusat. Namun ada diantara mereka yang merangkap disamping sebagai dewan kerajaan juga sebagai kepala daerah seperti *koghoerano*. Selain itu dalam bidang keagamaan juga telah dibentuk beberapa jabatan sebagai wakil raja dalam bidang agama yaitu; *Kino Agamano Wuna*, *Imamuno kota Wuna*, *Hatibino Wuna Moji Balano*. Mereka ini dikenal sebagai pejabat agama yang dipusat yang merupakan tangan kanan raja dalam bidang keagamaan (J. Couvreur, 2001: 61).

Jadi segala urusan keagamaan dalam wilayah kerajaan muna ditangani oleh mereka ini yang dibantu oleh para pejabat yang ada dikampung-kampung. Selain itu kalau di zaman modern kita kenal adanya pengawal istana/raja yang tugasnya menjaga keamanan raja yaitu; *kapita* sebagai ketua (kepala staf), *tunani/lotenani* 2 orang, *firisino pani* 2 orang, *pasi* 40 orang, *firisino kolaki* 4 orang, *siriganti* 4 orang, *bonto kapili* 4 orang, *kapili* 4 orang (J.Couvreur, 2001 :59)

Semuanya berjumlah 61 orang mereka inilah yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan raja. Dengan terbentuknya beberapa jabatan tersebut, maka lengkaplah sebuah kerajaan yang terdiri dari pejabat pusat atau pejabat tinggi, pejabat daerah maupun dewan kerajaan kedudukan Dewan kerajaan kedudukan dewan kerajaan (sarano wuna) sangat penting karena mereka inilah yang memilih dan mengangkat seorang Raja yang terdiri dari; *bonto balano* (*perdana menteri*) sebagai peminan satu orang, *mintarano bitara* (pengacara) sebagai wakil satu orang, *koghoerano* atau *mieno ghoera* (kepala daerah) 4 orang, *kapitalao* (pertahanan keamanan/panglima perang) 2 orang, *fato lindono* (4 *Mieno*) sebagai utusan daerah 4 orang (J. Couvreur, 2001 ; 54- 58).

Mereka inilah yang menentukan keputusan dalam hal pengangkatan seorang Raja Munadari beberapa jabatan tersebut dimana masing-masing mempunyai ruang lingkup fungsi dan wewenang yang telah ditentukan dalam hukum adat (Syarat Muna) yaitu: pertama Omputo/Raja;

Omputo/Raja adalah penguasa tertinggi pemerintahan dalam wilayah kerajaan Muna. Ia berhak mengangkat dan memperhentikan pejabat yang ada dibawahnya. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja didampingi oleh Bonto Balano serta mendapat pengawasan Dewan kerajaan (Serano Wuna).Pergantian raja dilakukan oleh Dewan kerajaan (wawancara dengan La Ode Sabri 8 april 2018).

Pemilihan seorang Raja dilakakukan dengan melalui musyawara dari para pejabat dibawahnya.Pejabat-pejabat kerajaan yang terbentuk dalam syarat Muna mengadakan sidang.Raja adalah dari golongan Kaomu pula. Biasanya yang menjadi calon adalah dari pejabat Kapitalao dan para Kino Bobato. Pemilhan seorang Raja dengan syarat sebagai berikut: Doaseanerayati (disenangi) oleh rakyat, Nokokalabia (berkelebihan) mempunyai kelebihan, Notiangkafi (diikuti/didukung) oleh rakyat, Notimotehi (ditakutu /berwibawa) memiliki kesaktian, Nomoghane (berani/ bertanggung jawab) dan kuat fisik (J. Couvreur, 2001: 64).

Kedua Bonto Balano merupakan orang kedua dari Omputo/Raja. Sebenarnya kedudukan Bonto Balano adalah sebagai Perdana Menteri akan tetapi juga sebagai Perdana Menteri akan tetapi juga sebagai ketua dewan kerajaan (Sarano Wuna). Bonto Balano mempunyai wewenang dalam menentukan keputusan perkara. Setiap hasil keputusan dari bawahan misalnya dari para Koghoerano, untuk sampai kepada raja harus melalui Bonto Balano.(J. Couvreur, 2001 :54)

Pemilihan Bonto Balano dilakukan oleh Dewan Kerajaan, oleh GhoeranoKabawo, Ghoerano Katobu bersama 2 orang Kapitalao calon yang terpilih diajukan kepada Lakina Wuna (Raja Muna) untuk disetujui. Ghoerano Tongkuno, Ghoerano Lawa dapat juga dicalonkan tetap dengan syarat tertentu. (Wawancara dengan La Mahi, 30 maret 2018). Keputusan kerajaan bahwa Tongkuno dan Lawa dapat diangkat langsung menjadi Bonto Balano walaupun masih menjabat sebagai Mieno Ghoera. Sedangkan Kabawo dan Katobu tidak dikandidatkan sebagai Bonto Balano. Mieno Kabawo dan Mieno Katobu tidak bisa diangkat langsung kecuali melepaskan dulu jabatannya sebagai Mieno Ghoera baru bisa diangkat sebagai calon Bonto Balano (Wawancara dengan Wa Ode Nursia 12 januari 2018).

Disini nampak kita lihat bahwa yang menonjol sebagai calon *bonto balano* adalah *Mieno Tongkuno* atas adanya peristiwa sejak pembentukan FatoGhoerano (4 wilayah). Semula hanya *Ghoera Tongkuno* yang selalu dicalonkan karena ia sebagai kakak (La Malindu). Hal ini tidak dapat diterima oleh putri La Marati (*bonto balano*) lainnya yaitu Wadaga (Mieno Ghoera Lawa). Ia menuntut agar saudara saudaranya juga dapat diangkat sebagai *bonto balano*. Akhirnya berjanji kepada putrinya bahwa ia dan keturunanya juga dapat diangkat sebagai *bonto balano*. Maka keluarlah suatu penggarisan bahwa calon dari *Ghoera Lawa* (keturunan Wadaga) dapat diangkat menjadi Bonto Balano. (J. Couvreur, 2001: 43).

Ketiga *mintarano bitara* (pengacara); bertugas dalam hal penyelesaian perkara-perkara dalam kerajaan. Namun demikian ia juga termasuk dalam anggota dewan sara, sehingga ia mempunyai hak suara dalam pemilihan raja atau Bonto Balano. Mintarano Bitara berasal dari golongan Walaka, oleh karena itu calon MintaranoBitara juga dari golongan Walaka biasanya menjadi calon adalah para Ghoera (Wawancara dengan La Ode Bajila 2 Desember 2018).

Keempat *Kapitalao* adalah merupakan panglima pertahanan bagi kerajaan Muna. Ia bertugas menjaga keamanan dalam keamanan dalam berbagai penjuru. Dalam bidang keamanan, ia membawahi barata. *Kapitalao* berasal dari golongan kaomu sehingga calon *kapitalao* juga berasal dari golongan *kaomu* (Bangsawan/La Ode). Biasanya calon Kapitalao berasal dari para Kino baik *kino/kamokula* (kepala kampung/orang tua adat) *bobato* maupun Barata. Dalam kerajaan Muna tedapat dua orang *Kapitalao* yaitu *kapitalao kansoopa* dan *kapitalao matagholeo*. *Kapitalao*

pertama *kansoopa* (panglima perang bagian barat) bernama Laode Padangkuku yang berkedudukan di Wasolangga. Sedangkan *matagholeo* (panglima perang bagian timur) bernama La Ode Mangguntara yang berkedudukan di Lahontohe Kemudian diganti oleh La Ode Kakolo yang berkedudukan di Lohia. (J. Couvreur, 2001: 56).

Kelima *koghoerano* adalah sebagai pelaksana pemerintahan di daerah (*ghoera*). Sebagai kepala wilayah yang bertanggung jawab atas segala pelaksana pemerintahan di daerah atas nama raja. Hal ini serupa atau sama dengan sistem pemerintahan desentralisasi dimana hak daerah-daerah diberikan hak otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan pemimpin daerah biasa juga disebut kepala wilayah. (Tamburaka, 2004: 384).

Koghoerano merupakan pelaksana pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Raja. *Koghoerano* inilah sebagai tangan kedua sesudah raja dalam hal pemerintahan. Setiap tindakan atau keputusan *dighoera* selalu disampaikan kepada raja melalui *bonto balano*. Tepat seperti bahwa *katuko salaka* atau *katuko fato peleno* (tongkat perak yang 4) hanya ada pada *koghoerano*. Mereka ini berhak menentukan perkara adat *dighoeranya* masing-masing dan hasil keputusan itu disampaikan kepada Raja melalui BontoBalano(Wanancara dengan La Mahi, 20 februari 2018)

Setiap *ghoera* terdiri atas beberapa kampung yang disebut *bobato* dan *bonto* serta dibawah *bobato bonto* atau masih ada lagi kampung terkecil yang dikenal dengan *tombu* (perkumpulan). pemerintahan *ghoera* dipimpin oleh *koghoerano (mieno ghoera)* yang mempunyai seperangkat jabatan yaitu: (1) Koghoerano (sebagai penguasa tertinggi di daerah). (2) Mesodano sebagai tangan kanan Koghoerano bertugas menyampaikan tugas Koghoerano kepada para Kino. (3) Kino atau Mieno sebagai kepala kampung Bobato dan Bonto. (4) Bontono Liwu bertugas menyampaikan perintah Kino atau Mieno kepada penduduk (5) Para Bela sebagai Bontono Liwu (6) Bonto Kafowawe bertugas mengurus semua pertikaian diantara penduduk biasa. (J. Couvreur, 2001: 64-71).

Koghoerano berasal dari golongan Walaka oleh karena itu calon Koghoerano juga berasal dari golongan Walaka. Biasanya calon Koghoerano mereka menduduki sebagai Mieno yang merupakan kepala Ka Bonto. Cara pemilihan Koghoerano (Mieno Ghoera) berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama oleh dewan kerajaan Muna dalam pencalonan Mieno Ghoera dicalonkan dua orang tiap ghoera dari Muna menyatakan bahwa dalam pencalonan Mieno Ghoera terdapat dua orang tiap ghoera seperti: (1) untuk Ghoerano Tongkuno maka sebagai calon adalah Mieno Tondo dan Modjino Tongkuno; (2) untuk Ghoerano Lawa maka sebagai Calon adalah Mieno Kaliwu – Liwu dan Modji Kamokulano Barangka, (3) untuk Ghoerano Kabawo sebagai Calon adalah Mieno Karoo dan Modji Kamokulano Wapepi; (4) untuk Ghoerano Katobu sebagai calon adalah Mieno Labaluba dan ModjinoLindo (La Ode Sabri, 8 februari 2018).

Ketentuan tersebut nampak adanya perbedaan dan keistimewaan pada daerah tertentu. Pembagian ini didasarkan atas latar belakang berdirinya suatu kampung. Jadi dalam pencalonan harus satu orang berasal dari kampung lama dan satu orang harus bersal dari kampung baru. Apabilah diantara mereka tidak ada yang bersedia, maka calon dapat diambil dari daerah lain dengan syarat bahwa ia adalah Siwulu (turunan) dari Ghoera terdahulu. Demikianlah cara pemilihan Koghoerano.

Kerajaan Muna hanya terdapat empat wilayah besar yang terdiri dari beberapa kampung yang sering disebut Fato Ghoerano, Ke empat wilayah tersebut adalah: (1) Ghoerano Tongkuno (wilayah Tonngkuno); Tongkuno adalah merupakan kampung tertua di kerajaan Muna sebelum terbentuknya daerah-daerah lain. Sehingga pada pembentukan Ghoera Tongkuno menempati urutan pertama yang dipimpin oleh La Malindu. Mieno tongkuno pertama bernama La Malindu. Ghoerano

Tongkuno membawahi beberapa buah kampung atau Liwu yang dikenal dengan Kabobato dan Bonto serta Liwu Barata. Adapun wilayah-wilayah dalam Ghoera Tongkuno yaitu: Liwu Ka Bonto yang masing-masing dipimpin oleh Mieno: Tongkuno, Kansitala, Tondo, Pentiro, Kowauno, Matagholeo, Kadolo, Laloa, Mawoli. Liwu Kabobato yang masing-masing dikepalai oleh Kino: Lahontohe, Lakologou, Labora, Latongku, Lakawoghe, Rete. Pada perkembangan selanjutnya daerah-daerah ini bertambah luas sehingga jumlah kampung bertambah pula. Apa lagi dengan terbentuknya barata, dimana setiap Barata membawahi beberapa buah kampung. Di Ghoera Tongkuno ada satu Barata yaitu Barata Lahontohe yang dikepalai oleh Kino Barata. Barata Lahontohe membawahi dua buah kampung yaitu: Liano Saa Wakowanentu, dalam barata Lahontohe terdapat struktur pemerintahan yaitu: Kino Barata, sebagai penguasa tunggal dibarat, Mintarano Bitara, bertugas menyelesaikan masalah dalam hukum adat, Sangkolaki sebagai pembantu Mintarano Bitara, Bontono Liwu sebagai pengurus lading, Parabola sebagai pembantu Bontono Liwu, Lotenani sebagai penjaga keamanan barata, Siriganti juga pembantu Lotenani. Bonto Kapilisama dengan tugas Siriganti. Sesuai dengan letaknya dipinggir pantai, Lahontohe merangkap dua fungsi yaitu sebagai pertahanan (Barata) dan sebagai syahbandar yang dapat memungut Bea dan Cukai. (Wawancara dengan Ismail, 2 februari 2018), (2) Ghoera Lawa (wilayah Lawa); Ghoera Lawa menempati urutan kedua berdasarkan ketentuan hukum adat sejak pembetukan Fato Ghoera pertama, Ghoera meliputi: (a) Liwu Ka Bonto yang dikepalai oleh Mieno yaitu: Barangka (Lawa, Kaura, Kaliwu-liwu, Lambu Balano, Kabawo, Kampani, Lafinde, Malainea. (b) Liwu Kabobato yang dikepalai oleh Kino yaitu: Lagadi, Watumela, Waulai, Latombe, Wamelai, (3) Ghoerano Kabawo (wilayah Kabawo); Kabawo sebagai Ghoera ketiga dalam kerajaan Muna seperti halnya, Ghoera Tongkuno, Ghoera Lawa dan Ghoera Kabawo juga dikepalai Mieno Ghoera. Mieno Ghoera pertama bernama La Ilangga putra ketiga dari Bonto Balano La Marati. Ghoera Kabawo membawahi beberapa buah kampung yang dikenal dengan Kabobato dan Kabonto. Kampung-kampung tersebut dipilih oleh Kino dan Mieno. Liwu-liwu dalam Ghoera Kabawo adalah: (a) Liwu Kabonto yang dikepalai masing-masing dipimpin oleh Mieno: Kabawo, Lembo, Wapepi, Kabangka, Lahorio, Kafofoo, Lensino. (b) Liwu Kabobato yang dipimpin oleh Kino yaitu: Wasolangka, Kasaka, Lasehao, Laiba, Bea. Ghoera Kabawo terdapat satu Barata yaitu Barata Wasolangka. Barata ini membawahi beberapa kampung yang terdiri dari: Manggarai, Waburansa, Wadolao, Wabalona, Labuandiri, Matombura, Maarobo. Seperti Barata Lahontohe, Barata Wasolangka juga terdapat kelengkapan pemerintah yang dikepalai oleh Kino Wasolangka. Adapun jabatan-jabatan dalam pemerintahan Barata Wasolangka sebagai berikut: Kino Barata Wasolangka sebagai penguasa tunggal dalam Barata Wasolangka. Kino Liwu sebagai pemimpin kampung bawahan. Bonto Liwu tugasnya menyampaikan perintah dari Kino Liwu kepada rakyat. Para Bela sebagai pembantu Bontono Liwu. Lotenani, Firisi dan Siriganti bertugas dalam keamanan kerajaan muna. Bonto Kapili bertugas mengurus perkara rakyat biasa. (4) Ghoera Katobu (wilayah Katobu); Ghoera Katobu merupakan Ghoera ke empat dalam wilayah kerajaan Muna, yang dikepalai oleh Mieno Ghoera. Mieno Ghoera Katobu yang pertama bernama Wa Opu putri ke 4 dari Bonto Balano La Marati. Dalam Ghoera Katobu juga terdapat beberapa kampung bawahan yang dikenal dengan Kabobato dan Kabonto yang masing-masing dikepalai Mieno Kino, Liwu-liwu tersebut adalah: (1) Liwu Kabonto yang dikepalai oleh Mieno yaitu: Katobu, Ndoke, Labalub, Kowouno, Kampani, Wakalalawe (2) Liwu Kabobato yang dikepalai oleh Kino yaitu: Tobe, Madawa, Lohia, Lakusi, Labongkuru, Mantobuah, Lasosodo. Ghoera Katobu terdapat atau Barata yang dikenal dengan Lohia. Barata Lohia berfungsi sebagai pertahanan kerajaan Muna sebagai pelabuhan syahbandar yang dapat memungut Bea Cukai. Dalam Barata Lohia terdapat

seperangkat jabatan yaitu: Kino Barata yang bertugas sebagai penguasa tunggal dalam wilayah Barata tersebut. Kino Barata berasal dari golongan Kaomu (Bangsawan) oleh karena itu calon Kino Barata juga dari para Kino Liwu. Bontono Liwu yang bertugas membantu Kino dalam menjalankan pemerintahan. Parabela membantu Bontono Liwu. Lotenani, firisi dan Siriganti bertugas menjaga keamanan seluruh Barata.

Dari keempat Ghoera yang ada, masing-masing Ghoera terbagi lagi ke dalam beberapa kampung (liwu). Untuk Ghoerano Tongkuno terdiri Tongkun, Kansitala, Tondo, Pentiro, Kowauno, Matagholeo, Kadolo, Laloea, Mawolighoerano lawa terdiri dari kampung Barangka (Lawa) Kaura. Kaliwu-liwu. Lambu Balano, Kabawo. Kampani, Lafinde, Malainea. Ghoerano kabawo meliputi Kabawo, Lembo, Wapepi, Kabangka, Lahorio, Kafofoo, Lensino, dan meliputi wilayah Katobu, Ndok, eLabaluba, Wou, Dopu, dan Wakalalawea.

Dari empat wilayah masing-masing membawahi sembilan (9) kampung, dan tiap kampung dikepalai satu Kamokula dan satu Modji (satu orang tua/tokoh adat dan Imam kampung), sedangkan Imam kampung ini wajib menghafal satu Juz Kitab Suci Al Quran; delapan (8) kampung, membawahi tujuh (7) kampung, enam (6) kampung.

Dampak Dibentuknya Fato Ghoera Di Kerajaan Muna

Terbentuknya sistem pemerintahan Ghoera pada kerajaan Muna sangat berpengaruh besar bagi kerajaan Muna itu sendiri. Dengan adanya pemerintahan baru ini berarti Raja telah mempunyai lembaga pemerintahan, dalam menjalankan pemerintahan dan kelak mereka ini terbentuk dalam Sarano Wuna (Dewan kerajaan). Setelah sarano wuna terbentuk, maka Raja bersama *sarano wuna* mulai membagi kerajaan muna menjadi *Fato Ghoera* (empat wilayah) yaitu; Ghoera Tongkuno, Ghoera Lawa, Ghoera Kabawo, Ghoera Katobu. Setiap Ghoera terdiri atas beberapa kampung yang dikenal dengan Bobato dan Bonto yang masing-masing dikepalai dikepalai oleh *kino* dan *mieno*. (Tamburaka, 2004:384)

Dari penjelasan diatas maka jelas bahwa dengan adanya sistem pemerintahan Ghoera sangat membantu tugas dari raja Muna dalam menjalankan pemerintahan. Raja dibantu oleh Koghoerano (pemimpin wilayah Ghoera) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan adanya pembentukan pemerintahan Ghoera nampak suatu sistem pemerintahan Desentralisasi dimana daerah-daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dan tiap-tiap Ghoera terdiri atas beberapa kampung yang dikenal dengan Kabobatu dan Kabonto. Antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan Ghoera serta pemerintah kampung-kampung kecil terjalin kerja sama yang baik. Dengan terjalinnya hubungan kerja sama antara raja dengan para Ghoera maka akan memperlancar jalannya pemerintahan. Hal ini dimungkinkan karena Mieno Ghoera dalam menjalankan pemerintahan jelas mendapat petunjuk serta pengawasan kepala wilayah yang mempertanggung jawabkan jalannya pemerintahan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan pemerintahan maka harus terjalin kerja sama yang baik antara raja sebagai pemerintah pusat dan para Ghoera sebagai pemerintahan daerah serta beberapa pemerintah kampung yang ada dalam wilayah Ghoera itu sendiri. (Tamburaka, 2004: 384).

Pada tahun 1903 belanda mulai masuk di daerah muna dengan pelabuhan Raha. Sejak itu belanda mulai mengadakan penyusutan kedalam masyarakat muna tetapi belum mencampuri urusan pemerintahan. Belanda mencampuri urusan pemerintahan di Muna pada tahun 1907 pada saat itu La Ode Maktubu menjadi raja. Kemudian tiba tentara Belanda yang di pimpin oleh Letnan Infantri palack mulai saat itu Belanda mencampuri urusan pemerintahan dalam kerajaan Muna. Campur tangan Belanda dalam urusan pemerintahan jelas pasti akan terjadi perubahan dalam

sistem pemerintahan kerajaan Muna. Kalau pada masa sebelumnya masuknya Belanda kita kenal dengan adanya sistem pemerintahan Ghoera, maka setelah Belanda berhasil mengambil alih pemerintahan Ghoera digantikan menjadi Distrik. (Wa Ode Nursya 12 Januari 2018)

Pada tahun 1903 sejak diterapkan Undang-Undang Desentralisasi' yang membagi daerah Hindia Belanda (Indonesia). Daerah Hindia Belanda dibagi atas 6 daerah Administrasi yaitu, Gewest, Afdeling, Onderafdeling, Regentschap, Distric, dan Onder Distric, yang masing-masing daerah dikepalai oleh seorang Pamong Raja Belanda. Dari situ dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut dapat merubah pemerintahan di Muna, saat itu Muna digabungkan dengan Buton, apalagi dengan adanya perjanjian "Korte Verklaring" yang ditanda tangani oleh sultan Buton La Ode Muhammad Asikin dihadapan Residen Bougaman pada tahun 1906 yang isi perjanjianya "Sebabap Raja Buton dan Laiwui hanya diakui setingkat kabupaten dan Buton membawahi Muna, Tiworo, Kaledupa, Kolisusu, Rumbia Kabaena yang diberi hak setingkat Distrik. Jadi sejak saat itu muna diakui oleh Belanda sebagai bagian dari kekuasaan Buton meskipun kerajaan Muna tidak mengakuinya. (J. Couvreur, 2001: 112-115).

Bersamaan dengan itu pada tahun 1909 Belanda membentuk "Bestuur Afdeling Bost Celebes" yang meliputi seluruh wilayah Sulawesi tenggara (minus kolaka) Bungku, Kolonodale. Perubahan yang dilakukan ini belanda jelas semakin memperkecil daerah-daerah kerajaan di Indonesia. Pada umumnya dan Sulawesi pada khususnya di Sulawesi tenggara pada saat itu hanya diakui dua Afdeling yaitu Afdeling Buton dan Afdeling Laiwui yang dibentuk pada tahun 1927 yang dikepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di BauBau (Buton). Dari kedua Afdeling(kerajaan) ini di bagi 3 Onderafdeling.

Khususnya Onderafdeling Muna dibagi menjadi 7 Distrik diantaranya bekas Ghoera tetap menjadi sebuah Distrik tambah dengan tiga kampung lainnya. Ke tujuh Distrik itu ialah: Distrik (kecamatan) Tongkuno, Distrik (kecamatan) Lawa, yang sekarang secara adminitrasi sudah masuk kabupaten Muna Barat, tetapi sampai saat ini masih termasuk dalam sistem fato Ghoer dalam permasalahan Saronu Wuna maupun adat, Distrik (kecamatan) Kabawo, Distrik (kecamatan) Katobu, Distrik (kecamatan) Tiworo, secara adminitrasi sudah masuk Muna Barat, Distrik (kecamatan) Wakorsel (wakorumba selatan), Distrik (kecamatan) kolisusu. Tiap-tiap Distrik dikepalai oleh seorang kepala Distrik yang biasa disebut Dhesi (Camat). Dalam pembagian Distrik ini terjadi pertukaran beberapa kampung yang menjadi bawahan Distrik. (J. Couvreur, 2001: 112-115).

Pada waktu itu Ghoera dihapus, maka pada tahun 1920 berlaku istilah Distrik (kecamatan), dimana nama-nama Ghoera masih dipakai namun pembagian kelompok berubah, sebagai contoh: Wale-ale dan wasolang kapada mulanya ada dibawah Distrik Tongkuno, tapi pindah pada Distrik Kabawo. (Wawancara dengan La Mahi, 30 maret 2018).

Istilah Ghoera dihapus dan diganti menjadi dengan Distrik. Demikian pula nama-nama kampung bawahan pada mulanya bernama Kabobato dan Kabonto diganti menjadi (kampung) yang dikepalai oleh kepala kampung. Dengan berakhirnya Ghoera jelas jabatan Koghoerano juga akan mulai berakhir. Demikian juga jabatan Kino dan Mieno dalam Kabobato dan Kabonto mulai berakhir. Jelas bahwa dengan hilangnya Ghoera dalam pemerintah sangat berpengaruh besar dalam masyarakat, namun dalam perkembangan selanjutnya para Mieno Ghoera dianggap sebagai pemegang hukum adat. Mereka ini sangat dibutuhkan dalam perkara adat, jadi mereka tetap menjadi pimpinan adat masyarakat kerajaan Muna. Wilayah Distrik disesuaikan dengan wilayah Ghoera /adat. Dengan adanya jabatan baru dalam daerah ini maka penguasa dalam wilayah Ghoera telah nampak menjadi dualism pemerintahan yakni, satu pihak kepala Ghoera/ adat dipihak lain kepala Distrik.

Mieno Ghoera tetap berjalan hanya dialih fungsikan menjadi pemangku adat. Sehingga sampai kemerdekaan istilah Mieno Ghoera tetap sampai akhirnya terbentuk Kabupaten mereka itu masih dibutuhkan dalam masyarakat maka nampaklah beberapa orang Mieno Ghoera terakhir yang masih terkenal dalam masyarakat Muna yaitu: Mieno Ghoera Tongkuno (La Halia), Mieno Ghoera Lawa (La Daesae), Mieno Ghoera Kabawo (La Katuge), Mieno Ghoera Katobu (La Oni). Disamping itu juga masih dikenal dengan para Mieno Fato Lindono (empat kampung besar), yang dibentuk sebelum Fato Ghoerano (empat wilayah), Mieno (orang) Kansitala, La Kadea Honta, Mieno (orang) Kaura, La Mpihihi, Mieno (orang) Lembo, La Rita, Mieno (orang) Ndoke, La Ndomu. Mereka-mereka ini masih tetap berpengaruh dalam seajarah panjang masyarakat Muna yang dianggap sebagai Kamokula (orang tertua) dalam persoalat adat maupun Sarano wuna (hukum adat Muna).

Masyarakat Muna mulai memperjuangkan untuk mendapatkan hak otonomi yaitu adanya tingkat II Kabupaten Muna guna dapat mengatur rumah tangga sendiri. Setelah memperoleh hak otonomi maka muna menjadi kabupaten dikepalai Bupati. Bupati Muna pertama adalah La Ode Koedoes mantan kapitalao (panglima perang). Pada saat itu Kabupaten Muna terdiri atas empat Kecamatan yang berada dalam bekas Ghoera. yaitu: Ghoera Katobu (wilayah Katobu), Kecamatan Katobulbu kotanya Raha, Ghoera Laworo (wilayah Lawa dan Tiworo), Kecamatan Laworo ibukotanya Dandila, meskipun sekarang secara Administrasi sudah masuk Kabupaten Muna Barat, Ghoera Katongku (wilayah Kabawo dan Tongkuno), Kecamatan Katongku Ibu kotanya Lasehao. Kecamatan Wakasusu (wakorumba kolisusu) ibukotanya Pure. Maka lahirlah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terdiri dari empat Kabupaten: Kendari dengan ibu Katanya Kendari, Buton dengan ibukotanya Bau-bau, Kolaka dengan ibukotanya Kolaka, Muna dengan ibukotanya Raha.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu: (1) Latar belakang dibentuknya fato ghoerno adalah akibat penambahan jumlah penduduk disatu sisi dan perluasan wilayah disisi lain. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan perluasan area pemukiman dan perluasan wilayah kerajaan. Luasnya wilayah kerajaan jelas menyulitkan bagi seorang raja dalam menjalankan pemerintahan serta dalam mengontrol seluruh kerajaan. Demikian pula halnya yang dialami raja La Titakono di kerajaan Muna dimana terjadi pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga kerajaan Muna pada saat itu bertambah luas. Untuk mengatasi hal itu maka raja La Titakono membagi wilayah kerajaan Muna menjadi fato ghoera (empat wilayah). (2) Dalam rangka memperlancar jalannya pemerintahan di daerah, maka La Titakono membagi wilayah kerajaan Muna menjadi empat 4 wilayah (FatoGhoerano) dan tiap-tiap Ghoera dikepalai Ghoera (kepala daerah). Jadi tiap tiap Ghoera mempunyai hak untuk mengatur sendiri daaerahnya. Dengan adanya pembentukan pemerintahan Ghoera nampak suatu sistem pemerintahan Desentralisasi dimana daerah-daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sehingga sangat membantu tugas dari raja Muna dalam menjalankan pemerintahan. (3) Dengan adanya pembentukan pemerintahan Ghoera nampak suatu sistem pemerintahan Desentralisasi diman Daerah-daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sehingga sangat membantu tugas dari raja Muna dalam menjalankan pemerintahan. (4) Nama-nama Tongkuno, Lawa, Kabawo dan Katobu, didasarkan atas hak dalam menentukan keputusan dari putra- putrid Bonto Balano La Marati yaitu: Tongkuno asal kata (pikul) yang berarti memikul tanggung jawab penuh terhadap suatu keputusan. Karena ia sebagai kaka (La malindu) bahkan mieno Tongkuno dapat dianggap sebagai orang kedua dari Bonto Balano. Lawa

asal kata melewati (mempertemukan) yang berarti mempertemukan pendapat diantara Mieno dalam musyawarah. Bahkan ada juga mengatakan bahwa Lawa berarti tangga. Sebeb ia (Wa daga) sebagai anak kedua sebagai perantara. Kabawo asal kata Mebawoni (menambah/menyempurnakan) berarti ia sebagai anak ke tiga (La Ilangga) dapat mengusulkan setiap keputusan yang belum tuntas. Katobu asal kata Metobuno (kelompokan/klasifikasikan) setiap hasil musyawara. Karena ia (Wa Opu) sebagai anak Kampufu (bungsu) sehingga hanya mengikut saja. Pada kelompok mana ia berada. Bahakn ada juga pendapat bahwa Katobu tidak boleh mengeluarkan suatu keputusan sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan, 1967. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Prapanjat.
- Couvreur Jules. 2001. *Kerajaan Sejarah dan Kebudayaan Muna*. Kupang: Artha Wacana Press
- Hanafiah, 1983. *Pendekatan wilayah dan pembangunan Desa*. Bandung: IPB Press
- Hugiono, 1987. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Depdikbud.
- Hutauruk, 1983. *Asas-asas Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Press
- Kadir Pua, 2018. *Kabupaten Muna Dalam Angka*. BPS Kabupaten Muna.
- Leirissa, R.Z. 1996. *Historiografi Umum (Program Magister Ilmu Sejarah, UI)*. Jakarta: UI Press
- Lubis. M. 1981. *Ilmu Negara*. Bandung; Alumni.
- Nasroen, M, 1986. *Asal Mula Negara*. Jakarta: Aksara Baru.
- Samidjo, 1986. *Pemahaman sejarah Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sjamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Supriatna, Tjahya, 1993. *Sistem Adminitrasi Pemerintah Di Daerah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tamburaka, E, Rustam. 2004. *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun*, Kendari: Pemerintah Prov. Sultra
- Waming, 1983. *Pengantar Ilmu Negara*. Yogyakarta: Ombak